



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten
Banyumas 53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Nomor : 273 /SEK.PN.W12-U24/KU2.1/II/2026 24 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester II
Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Pengadilan Negeri Banyumas (098022)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jalan D.I Panjaitan No. 62 Purwokerto Selatan
Purwokerto Selatan 53174

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Keuangan Semester II (Unaudited) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Banyumas (098022)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas,



Normandito Wijaya

2025



**PENGADILAN NEGERI
BANYUMAS (098022)**

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2025 (UNAUDITED)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Pramuka No. 9 Telp. (0281) 796016 Fax. (0281) 796015

Banyumas - Jawa Tengah 53192

Website : www.pn-banyumas.go.id, email : pn_banyumas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Banyumas adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyumas, 24 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan.....	11
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional.....	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	23
V. Catatan atas Laporan Keuangan	25
A. Penjelasan Umum.....	25
A.1. Dasar Hukum	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	28
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	29
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	37
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	37
B.2. Belanja	38
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	43
C.1. Aset Lancar	43
C.2. Aset Tetap	46
C.3. Aset Lainnya.....	51
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	53
C.6. Ekuitas.....	54
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	55

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	55
D.2.	Beban Pegawai.....	55
D.3.	Beban Persediaan	57
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	57
D.5.	Beban Pemeliharaan	58
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	59
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	59
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	60
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
E.1.	Ekuitas Awal.....	61
E.2.	Surplus/(defisit) LO.....	61
E.3.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	61
E.4.	Transaksi Antar Entitas	62
E.5.	Ekuitas Akhir	62
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	63
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	63
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	63
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	Error!

Bookmark not defined.

I Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
53192, www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyumas, 24 Februari 2026
Kepala Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Banyumas



Normandito Wijaya

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.132.000,- atau mencapai 42,32 persen dari estimasi Pendapatannya sebesar Rp5.038.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.052.223.411,- atau mencapai 99,34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.085.885.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	5.038.000	2.132.000	42,32	2.977.440
Belanja Negara	5.085.885.000	5.052.223.411	99,34	4.161.727.153

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.082.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.769.357.704,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (6.768.275.704). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (6.768.275.704,-)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp14.337.423.980,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(6.768.275.704,-)kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.457.228.911,- sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp13.026.377.187,-.

4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, Kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.130.672.146- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.459.429,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp 14.123.212.717,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.104.294.959,- dan Rp 13.026.377.187,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	7.459.429	0	7.459.429	0
Aset Tetap	14.123.212.717	14.338.739.183	(215.526.466)	(1.50)
Jumlah Aset	14.130.672.146	14.338.739.183	(208.067.037)	(1.5)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.104.294.959	1.315.203	1.102.979.756	83.86
Jumlah Kewajiban	1.104.294.959	1.315.203	1.102.979.756	83.86
Ekuitas				
Ekuitas	13.026.377.187	14.337.423.980	(1.311.046.793)	(9.14)
Jumlah Ekuitas	27.093.379.031	14.337.423.980	(1.311.046.793)	(9.14)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.130.672.146	14.338.739.183	(208.067.037)	(1.45)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2025, Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya Kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catat	2025			2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Perpajakan	B.1.1	0	0	0	0
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	5.038.000	2.132.000	42.32	2.977.440
			0	0	0	0
3.	Penerimaan Hibah	B.1.3				
	Jumlah Pendapatan dan Hibah		5.038.000	2.132.000	42.32	2.977.440
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.701.654.000	3.668.726.534	96	2.867.635.129
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.244.231.000	1.243.496.877	99.94	1.294.092.024
3.	Belanja Modal	B.2.3.	140.000.000	140.000.000	100	0
	Jumlah Belanja Negara		5.085.885.000	5.052.223.411	99.34	4.161.727.153

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	7.459.429	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	10.878.192.000	10.878.192.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.571.603.825	3.024.466.325
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7.042.794.000	7.042.794.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	9.432.742	9.432.742
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(7.378.809.850)	(6.616.145.884)
Jumlah Aset Tetap		14.123.212.717	14.338.739.183
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.3. 2.	0	182.401.333
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	(182.401.333)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		14.130.672.146	14.338.739.183
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	1.103.244.959	1.315.203

Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 3.	1.050.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 4.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.104.294.959	1.315.203
Jumlah Kewajiban		1.104.294.959	1.315.203
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	13.026.377.187	14.337.423.980
Jumlah Ekuitas		13.026.377.187	14.337.423.980
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.130.672.146	14.338.739.183

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1.082.000	2.045.940
Jumlah Pendapatan		1.082.000	2.045.940
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 2	4.751.377.454	2.868.530.379
Beban Persediaan	D. 3	56.857.280	46.205.290
Beban Barang dan Jasa	D. 4	613.434.569	568.352.923
Beban Pemeliharaan	D. 5	550.239.915	623.831.001
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	34.784.520	55.863.115
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bunga	D. 8	0	0
Beban Subsidi	D. 9	0	0
Beban Hibah	D. 10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 11	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 12	762.663.966	687.016.772
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 11	0	0
Beban Transfer	D. 12	0	0
Beban Lain-lain	D. 13	0	0
Jumlah Beban		6,769,357,704	4.849.799.480
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6,768,275,704)	(4.847.393.540)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	1.504.500

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	1.504.500
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(6,768,275,704)	(4.845.889.040)
Pos Luar Biasa	D. 13 0	0
Pos Luar Biasa	0	0
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus/Defisit Laporan Operasional	(6,768,275,704)	(4.845.889.040)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	14.337.423.980	15.024.656.857
Surplus/Defisit LO	E. 2	(6.768.275.704)	(4.845.982.590)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Lain-Lain	E. 4	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	5.457.228.911	4.158.749.713
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 6	(1.311.046.793)	(687.232.877)
Ekuitas Akhir		13.026.377.187	14.337.423.980

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Instansi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

Visi Pengadilan Negeri Banyumas adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Banyumas menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan badan peradilan;
4. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertll administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

1. Penyelesaian Administrasi Berkas Perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu

2. Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara yang Kurang dari 5 (lima) bulan.
 3. Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi secara lengkap dan tepat waktu.
 4. Jumlah Pelaksanaan Zetting Plaatz (tempat sidang tetap di tingkat pertama).
 5. Jumlah Standart Pelaksana Tata Kerja dan Tata Kelola Pengadilan Di lingkungan Peradilan Umum Yang Disusun.
 6. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
 7. Persentase Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Akurat.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Diluat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok dalam Program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas adalah :

- 1) Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa Internal dan Eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan.
- 2) Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Banyumas juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang;
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan;
4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: Modul Penganggaran; Modul Komitmen; Modul Pembayaran; Modul Bendahara; Modul Persediaan; Modul Aset Tetap; Modul Pelaporan; dan Modul Administrator.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dilyaikan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dilyayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang dllerikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi Kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dllayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya Kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan Kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut di dasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta *rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau

bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dilatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dilayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dilayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp2.132.000,-*

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.132.000,- atau mencapai 42,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.038.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.038.000	2.132.000	42,32
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah		5.038.000	2.132.000	39

Realisasi Pendapatan Negara Semester II Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp845.440,- atau 39 persen dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pejabat yang meng huni Rumah Dinas tahun 2025.

Perbandingan realisasi PNBP Semester II Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP Semester II TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.132.000	1.472.940	659.060	44,7

2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.504.500	(1.504.500)	(100)
Jumlah		2.132.000	2.977.440	(845.440)
				28,39

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara Rp
5,052,223,411,-*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.052.223.411,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.34 persen dari anggaran senilai Rp 33.661.589,-.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,701,654,000	3,669,091,692	99,12
Belanja Barang	1,244,231,000	1,243,496,877	99,94
Belanja Modal	140,000,000	140,000,000	100
Total Belanja Bruto	5,085,885,000	5,052,588,569	99,35
Pengembalian Belanja Pegawai	0	365,158	0
Total Belanja Neto	5,085,885,000	5,052,223,411	99,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar RpRp 890.496.258,- atau sebesar 21,4 persen dari realisasi tahun lalu. Kenaikan tersebut disebabkan karena ada Belanja Gaji Pokok PPPK, Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara, serta adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Perbandingan realisasi belanja Semester II Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3,668,726,534	2.867.635.129	Rp. 801.091.405	27,93
Belanja Barang	1,243,496,877	1.294.092.024	(Rp50.595.147)	(3,91)
Belanja Modal	140,000,000	0	140,000,000	100
Jumlah	5,052,223,411	4.161.727.153	Rp 890.496.258	21,4

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai Rp
3,668,726,534*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,668,726,534 dan Rp2.867.635.129,-

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 801.091.405,- atau 27,93 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai periode Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan terdapat Belanja Gaji Pokok PPPK, Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara, serta adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.317.626.640	1,429,878,820	Rp112.252.180	8.52
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.941	16,808	(Rp133)	0.78
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	86.644.524	91,616,982	Rp4.972.458	5.74
Belanja Tunj. Anak PNS	24.986.935	22,006,600	(Rp2.980.335)	11.93
Belanja Tunj. Struktural PNS	19.020.000	27,600,000	Rp8.580.000	45.16
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.025.445.000	59,015,000	(Rp966.430.000)	94.24
Belanja Tunj. PPh PNS	121.011.899	6,873,857	(Rp114.138.042)	94.32
Belanja Tunj. Beras PNS	64.453.800	68,074,800	Rp3.621.200	5.62
Belanja Uang Makan PNS	197.855.000	237,795,000	Rp47.400.000	23.97
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.945.000	13,350,000	Rp2.405.000	22.99
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	184,565,569	Rp184.565.569	100

Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	1,414,100,000	Rp1.414.100.00	100
			0	
Belanja Gaji Pokok PPPK	0	74,520,000	Rp74.479.600	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,928	Rp1.928	100
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,166,520	6,166,520	100
Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,662,928	1,662,928	100
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	6,083,280	6,083,280	100
Belanja Uang Makan PPPK	0	20,744,000	20,744,000	100
Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	5,060,000	5,060,000	100
Total Belanja Bruto	2.868.005.73	3,669,091,692	Rp801.085.953	27,93
	9			
Pengembalian Belanja	(370.610)	(365.158)	(5.452)	
Total Belanja Neto	2.867.635.129	3,668,726,534	Rp801.091.405	27,93

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
Rp1,243,496,877*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 1,243,496,877,- dan Rp1.294.092.024,-

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,274,976,- atau 0,03 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik (Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	0	949,000	(7.004.000)	1
Belanja Barang Operasional	529.503.623	494,503,198	(68.410.166)	(0,11)
Belanja Jasa	38.688.995	98,703,535	12.480.789	0,47
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55.863.115	34,784,520	21.394.075	0,62
Belanja Barang Persediaan	60.866.340	74,907,025	(8.748.160)	(0,12)
Belanja Pemeliharaan	609.169.951	539,649,599	82.182.148	0,15
Total Belanja Bruto	1.294.092.024	1.262.197.338	31.894.686	(0,03)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	1.294.092.024	1,243,496,877	31.894.686	(0,03)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
Rp140.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 dan Desember 2024 adalah sejumlah Rp140.000.000,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140.000.000,- atau 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pada Semester II Tahun Anggaran 2025 kantor Pengadilan Negeri Banyumas tidak mendapatkan alokasi DIPA untuk belanja modal.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Perubahan	
			Rp.	%
Peralatan dan Mesin	0	140.000.000	140.000.000	100
Total Belanja Bruto	0	140.000.000	140.000.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	0	140.000.000	140.000.000	100

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp7.459.429,
00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7,459,429,- dan Rp0,00,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Persediaan	7.459.429	0
Total Aset Lancar	7.459.429	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00,- dan Rp0,00,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan diawasi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2025	TA 2024
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Bank	0	0
	Tunai	0	0
	Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00,- dan Rp0,00,- yang merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi per tanggal neraca. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Pemotongan Gaji Induk untuk pembayaran sewa rumah dinas bulan Oktober 2025 yang dihuni oleh 1 (satu) (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Piutang Lainnya	0	0
	Total	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan
Rp7,459,429*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7,459,429,- dan Rp0,00,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname fisik Nomor 57/SEK.PN.W12-U24/PL1.1.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp7,459,429

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	6,476,850	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	982,579	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0

9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		7,459,429	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp
14,130,672,146,-

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025 tersaji sebesar Rp14.338.739.183,- dan Rp 14,130,672,146,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2025	Perubahan
1	Tanah	10.878.192.000	10.878.192.000	0
2	Peralatan dan Mesin	3.024.466.325	3,571,603,825	547.137.500
3	Gedung dan Bangunan	7.042.794.000	7.042.794.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	9.432.742	9.432.742	0
Jumlah		20.954.885.067	20.954.885.067	0
Akumulasi Penyusutan		(6.616.145.884)	(7,378,809,850)	(762,663,966)
Nilai Buku Aset Tetap		14.338.739.183	14,130,672,146	(208,067,037)

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp
10.878.192.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama masing-masing sebesar Rp10.878.192.000,- dan Rp10.878.192.000,-. Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 sama tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Perubahan Aset Tanah hanya terdapat pada kode barang dikarenakan

Reklasifikasi Golongan Tanah yang dijelaskan lebih lanjut pada CALBMN Semester II Tahun Anggaran 2025.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	Kode Barang	Luas (m ²)	NUP	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2010101001	278	1	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas WKPN Ksatria NO. 11	452.083.000
2.	2010101001	200	2	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas KPN Pengadilan No. 14	168.954.000
3.	2010101002	700	1	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Sekretaris dan Hakim Pemotongan No. 7 / 7a	360.106.000
4.	2010101002	1.600	2	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Hakim Karang Sawah NO. 39/ 41	1.437.623.000
5.	2010101002	450	3	Hak Pakai MA RI	Rumah Dinas Panitera Pramuka No. 5	591.477.000
6.	2010101005	2.150	1	Hak Pakai MA RI	Kantor Lama Pengadilan No.28	1.697.886.000
7.	2010104001	5.250	1	Hak Pakai MA RI	Gedung Kantor Pramuka No.9	6.170.063.000
Jumlah						10.878.192.000
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp
3,571,603,825,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3,571,603,825,- dan Rp3.024.466.325,-.

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin pada Semester II Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 30 Desember 2024	3.024.466.325
Mutasi Tambah	547,137,500
Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	3,571,603,825
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	3,571,603,825

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp 7.042.794.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.042.794.000,- dan Rp7.042.794.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	7.042.794.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	7.042.794.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(3.747.788.264)
Nilai Buku 31 Desember 2025	3.295.005.736

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-. Saldo tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 9.432.742*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.432.742,- dan Rp9.432.742,-.

Nilai Perolehan Aset Tetap lainnya pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas per 31 Desember 2025 sama, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	9.432.742
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	9.432.742
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	9.432.742

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada kantor Pengadilan Negeri Banyumas.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Kesalahan Pencatatan Honor Pejabat Pengadaan untuk Belanja Modal 2025 berupa 8 Unit PC dan 2 Printer	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi Kesalahan Pencatatan Honor Pejabat Pengadaan untuk Belanja Modal 2025 berupa 8 Unit PC dan 2 Printer	0
KDP yang menjadi Aset Definitif	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap
Rp.7,378,809,850*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp.7,378,809,850) dan (Rp6.616.145.884,-)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.878.192.000	0	10.878.192.000
2	Peralatan dan Mesin	3.571.603.825	(3.053.418.133)	518.185.692
3	Gedung dan Bangunan	7.042.794.000	(4.325.391.717)	2.717.402.283
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.432.742	0	9.432.742
Jumlah		20.954.885.067	(7.378.809,850)	13.576.075.217

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp 0,00

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Banyumas serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp0,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp
1,103,244,959

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1,103,244,959,- dan Rp 895.250,- yang merupakan Kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	TA 2024	TA 2025
Belanja Pegawai belum dibayar	895.250	1.083.689.000
Belanja Barang yang masih harus dlbayar	326.403	19.555.959
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0	0
Jumlah	1.221.653	1,103,244,959

Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp0,00

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
Jumlah	0	0

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp1.050.000

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.050.000,- dan Rp 933.000,-, merupakan pendapatan yang sudah diterima kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat Kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	1.050.000	933.000
Jumlah	1.050.000	933.000

Uang Muka
dari KPPN
Rp0,00

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN
per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2025	2024
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.6. Ekuitas

Ekuitas
Rp
13,026,377,187

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13,026,377,187,00 Rp14.337.517.530,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp.
2.132.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 2.132.000,- dan Rp 2,977,440,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.132.000	2,977,440	(845.440)	(39,65)
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Jumlah		2.132.000	2,977,440	(845.440)	(39,65)

Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berasal dari pendapatan sewa kantin dan DYK tahun 2025.

D.2. Beban Pegawai

Beban
Pegawai Rp
3,668,726,534

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,668,726,534,- dan Rp2.867.635.129,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dllerikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.317.626.030	1,429,878,820	(95.783.033)	(0,07)
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.941	16,808	(2.926)	(0,15)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	88.644.524	91,616,982	(14.734.410)	(0,14)
Beban Tunj. Anak PNS	24.986.935	22,006,600	(8.289.973)	(0,25)
Beban Tunj. Struktural PNS	19.020.000	27,600,000	1.170.000	0,07
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.025.464.800	58,995,200	(14.715.200)	(0,01)
Beban Tunj. PPh PNS	121.011.899	6,873,857	14.831.463	(0,14)
Beban Tunj. Beras PNS	64.453.800	68,074,800	(17.380.800)	(0,21)
Beban Uang Makan PNS	198.360.450	238,195,000	(31.882.550)	(0,14)
Beban Tunjangan Umum PNS	10.945.000	13,350,000	(1.865.000)	(0,15)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(365.000)	(365.000)	100
Beban Tunjangan Pph Pejabat Negara	0	1,022,465,569	1,022,465,569	100
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	1,658,470,720	Rp1.414.100.000	100
Beban Gaji Pokok PPPK	0	74,520,000	Rp74.479.600	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	1,928	Rp1.928	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,166,520	6,166,520	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	0	1,662,928	1,662,928	100

Beban Tunjangan Beras PPPK	0	6,083,280	6,083,280	100
Beban Uang Makan PPPK	0	20,744,000	20,744,000	100
Beban Tunjangan Umum PPPK	0	5,060,000	5,060,000	100
Total Beban	2.868.005.739	4,751,377,454	Rp1.883.371.715	

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp
56,857,280

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.56,857,280,- dan Rp 46,205,290. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	46,205,290	56,857,280	10,651,990	23,04
Jumlah	46,205,290	56,857,280	10,651,990	23,04

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp
593.855.733

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 593.855.733,- dan Rp568.352.923,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	476.081.748	420,121,498	(55.960.250)	(11,75)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.599.500	4,608,000	1.008.500	28,02

Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29.448.000	47,640,000	18.192.000	61,78
Beban Barang Operasional Lainnya	20.374.375	22,133,700	1.759.325	8,64
Beban Bahan	0	300.000	300.000	100
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	0	649.000	649.000	100
Beban Langganan Listrik		19,361,528		
Beban Langganan Telepon	1.224.925	1,000,753	(195.145)	(15,93)
Beban Langganan Air	2.020.590	2,129,600	162.675	8,05
Beban Sewa	35.103.785	94,990,490	59.886.705	170,60
Beban Jasa Lainnya	500.000	500.000	0	0
Jumlah	568.352.923	613,434,569	45,081,646	7,93

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp
550,239,915

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 550,239,915,- dan Rp623.831.001,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	373.336.425	334,522,950	(38.813.475)	(10,40)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	25.323.500	4,800,000	(20.523.500)	(81,05)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.510.026	200,326,649	(10.183.377)	(4,84)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	14.661.050	10,590,316	(4.070.734)	27,77
Jumlah	623.831.001	550,239,915	(73.591.086)	(11,08)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 34,784,520*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 34,784,520,- dan Rp55.863.115,- . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	51.663.115	32.684.520	(18.978.595)	(36,74)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	(50)
Jumlah	55.863.115	34,784,520	(21.078.595)	(37,73)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp
762,663,966*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 762,663,966,- dan Rp687.016.772,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	109.413.318	185,060,513	75.647.195	69,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	577.603.454	577.603.454	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	687.016.772	762,663,966	75,647,194	11,011

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0,-

Jumlah Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,0,- dan Rp1.504.500,-. Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2025	Naik(Turun)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.504.500	0	(1.504.500)	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	1.504.500	0	(1.504.500)	0

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp
14,337,423,980

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14,337,423,980,- dan Rp15.024.656.857,-.

E.2. Surplus/(defisit) LO

Surplus/(defisit)
LO Rp
(6,768,275,704)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp 6,768,275,704,-) dan (Rp4.845.889.040,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang
Menambah/Men
urangi Ekuitas
Rp 0

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

Tabel 51 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2025 (dalam satuan Rupiah)

Koreksi Ekuitas	Nilai
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi lain-lain	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp
5,457,228,911*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5,457,228,911 dan Rp4.158.749.713,- .

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

**Tabel 52 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,052,223,411
Diterima dari Entitas Lain	(2,132,000)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	407,137,500
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	5,457,228,911

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp
13,026,377,187*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,026,377,187 dan Rp14.337.517.530,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas Semester II Tahun Anggaran 2025.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas terdapat Pendapatan dan Belanja secara akrual pada periode ini sebagai berikut:

No	Kode Akun	Nama Uraian Akun	Debet	Kredit
1	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		1.050.000
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	1.050.000	
2	522113	Belanja Langganan Air	148.590	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		148.590
3	522112	Belanja Langganan Telepon	95.121	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		95.121
4	522111	Belanja Langganan Listrik	19.361.528	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		19.361.528
5	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.369.000	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.369.000
6	511324	Belanja Tunj. Pph Pejabat Negara	837.950.000	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		837.950.000

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto A/C 653250980221000 a.n. BPG 029 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto A/C 654440991251000 a.n. BPG 029 PN BANYUMAS yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- dan
3. PT. Bank BTN Cab. Purwokerto A/C 0003301300005367 a.n. RPL 029 PN BANYUMAS UTK PDT BIAYA PEKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 42.388.112 ,.-

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai Revisi DIPA Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 09 Januari 2025;
2. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 3 Februari 2025;
3. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 23 Februari 2025;
4. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 24 Maret 2025;
5. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 23 April 2025;
6. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 10 Januari 2025;
7. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 30 Januari 2025; dan
8. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 22 Agustus 2025.
9. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 26 September 2025.

10. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 06 Oktober 2025.
11. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 24 Oktober 2025.
12. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 27 Oktober 2025.
13. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 14 November 2025.
14. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA pada tanggal 9 Desember 2025.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

DAFTAR DAN LAMPIRAN

INFORMASI KINERJA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS SEMESTER II TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Banyumas
 Program : Dukungan Manajemen
 Hasil Program : Layanan
 Lokasi : Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005.01 WA 1071 EBB	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rincian Output : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	140.000.000	140.000.000	100	26	26	Unit	100	Selesai Realisasi
005 01 WA 6986 EBA	Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal Rincian Output : 1. Layanan Umum	700,000	649.000	92,71	1	1	Laporan	100	Selesai Realisasi
	2. Layanan Perkantoran	4.479.745.000	4.885.935.569	98,81	1	0	Layanan	98,81	Selesai Realisasi
005 01 WA 6986 EBD	Kegiatan : Layanan Manajemen Kinerja Internal Rincian Output : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	300,000	100	1	1	Dokumen	100	Selesai Realisasi



Banyumas, 24 Februari 2026

Sekretaris,

NORMANDITO WIJAYA, S.Kom., M.M.

NIP. 19861006 200912 1 004

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Mahkamah Agung RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (098022. Pengadilan Negeri Banyumas) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui - program prioritas, - kegiatan prioritas, yang tersebar di - Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. - dan realisasi sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Program Prioritas Nasional I - Pengadilan Negeri Banyumas TA.2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satker : Pengadilan Negeri Banyumas

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Prioritas Nasional II – Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui - program prioritas, - kegiatan prioritas, yang tersebar di - Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. - dan realisasi sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Program Prioritas Nasional II - Pengadilan Negeri Banyumas TA.2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satker : Pengadilan Negeri Banyumas

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui - program prioritas, - kegiatan prioritas, yang tersebar di - Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. - dan realisasi sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Program Prioritas Nasional III - Pengadilan Negeri Banyumas TA.2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satker : Pengadilan Negeri Banyumas

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Prioritas Nasional IV – Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pelaksanaannya di antaranya melalui - program prioritas, - kegiatan prioritas, yang tersebar di - Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. - dan realisasi sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program Prioritas Nasional IV - Pengadilan Negeri Banyumas TA.2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satker : Pengadilan Negeri Banyumas

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

5. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 Pelaksanaannya di antaranya melalui - program prioritas, - kegiatan prioritas, yang tersebar di - Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. - dan realisasi sebesar Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Program Prioritas Nasional V - Pengadilan Negeri Banyumas TA.2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satker : Pengadilan Negeri Banyumas

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
BEBAN PENYUSUTAN AKUMULASI
PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU
ASET TETAP*

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025
Pengadilan Negeri Banyumas**

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai	Akumulasi peny.. s.d. Periode ini	Nilai Buku
A.	Tanah	10.628	10.878.192.000	0	10.878.192.000
	Tanah Persil	10.628	10.878.192.000	0	10.878.192.000
B.	Peralatan dan Mesin	694	3,571,603,825	(3,053,418,133)	518,185,692
1.	Alat Bantu	2	245.934.380	0	245.934.380
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	760,646,234	(58,162,500)	348,975,000
3.	Alat Kantor	118	299,256,000	(279,585,000)	19,671,000
4.	Alat Rumah Tangga	469	1,163,155,067	(1,053,187,581)	109,967,486
5.	Alat Studio	15	78.089.040	(61,984,494)	16,104,546
6.	Alat Komunikasi	5	16.879.000	(16.879.000)	0
7.	Komputer Unit	63	757,148,512	(736,162,102)	20,986,410
8.	Peralatan Komputer	23	250,495,592	(248,014,342)	446,804,884
C.	Gedung dan Bangunan	10	7.042.794.000	(4,325,391,717)	2,717,402,283
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	5.500.226.000	(3,229,628,601)	2,270,597,399
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8	1.542.568.000	(1,095,763,116)	46,804,884
D.	Aset Tetap Lainnya	28	9.432.742	0	9.432.742
	Bahan				
1.	Perpustakaan Tercetak	25	9.373.742	0	9.432.742
2.	Kartografi, naskah dan lukisan	1	59.000	0	59.000
E.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
1.	Alat Ukur	0	0	0	0
2.	Alat Kantor	0	0	0	0
3.	Alat Rumah Tangga	0	0	0	0

4.	Komputer Unit	0	0	0	0
5.	Peralatan Komputer	0	0	0	0
	Total	21,502,022,567	(7,378,809,850)	14,123,212,717	

Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2025

No	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
					Nilai	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

***B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL***

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 098022

Tgl Data : 21/02/26 1:38 PM
Tgl Cetak : 21/02/26 9:08 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,085,885,000	5,052,223,411	(33,661,589)	99.34	4,279,862,000	4,161,727,153	(118,134,847)	97.24
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Banyumas, 21 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA



Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 098022

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:30 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,279,862,000	4,161,727,153	(118,134,847)	97.24	4,460,835,000	4,321,699,146	(139,135,854)	96.88
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/02/26 1:38 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 9:10 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,082,000	2,405,940	(1,323,940)	(55.028)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,082,000	2,405,940	(1,323,940)	(55.028)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,082,000	2,405,940	(1,323,940)	(55.028)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,751,377,454	2,868,623,929	1,882,753,525	65.633
Beban Persediaan	56,857,280	46,205,290	10,651,990	23.054
Beban Barang dan Jasa	613,434,569	568,352,923	45,081,646	7.932
Beban Pemeliharaan	550,239,915	623,831,001	(73,591,086)	(11.797)
Beban Perjalanan Dinas	34,784,520	55,863,115	(21,078,595)	(37.733)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/02/26 1:38 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 9:10 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	762,663,966	687,016,772	75,647,194	11.011
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,769,357,704	4,849,893,030	1,919,464,674	39.577
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,768,275,704)	(4,847,487,090)	(1,920,788,614)	39.624
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1,504,500	(1,504,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,768,275,704)	(4,845,982,590)	(1,922,293,114)	39.668
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,768,275,704)	(4,845,982,590)	(1,922,293,114)	39.668

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 21 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:30 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,405,940	4,104,835	(1,698,895)	(41.388)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,405,940	4,104,835	(1,698,895)	(41.388)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,405,940	4,104,835	(1,698,895)	(41.388)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,868,623,929	3,039,182,808	(170,558,879)	(5.612)
Beban Persediaan	46,205,290	65,635,950	(19,430,660)	(29.604)
Beban Barang dan Jasa	568,352,923	631,202,093	(62,849,170)	(9.957)
Beban Pemeliharaan	623,831,001	530,966,353	92,864,648	17.49
Beban Perjalanan Dinas	55,863,115	34,469,040	21,394,075	62.068
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:30 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	687,016,772	740,246,530	(53,229,758)	(7.191)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,849,893,030	5,041,702,774	(191,809,744)	(3.804)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,847,487,090)	(5,037,597,939)	190,110,849	(3.774)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,504,500	0	1,504,500	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,504,500	0	1,504,500	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,504,500	0	1,504,500	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,845,982,590)	(5,037,597,939)	191,615,349	(3.804)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,845,982,590)	(5,037,597,939)	191,615,349	(3.804)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:31 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	15,024,656,857	15,724,296,235	(699,639,378)	(4.45)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,845,982,590)	(5,037,597,939)	191,615,349	(3.8)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,158,749,713	4,337,958,561	(179,208,848)	(4.13)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(687,232,877)	(699,639,378)	12,406,501	(1.77)
EKUITAS AKHIR	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 9:12 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,768,275,704)	(4,845,982,590)	(1,922,293,114)	39.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,457,228,911	4,158,749,713	1,298,479,198	31.22
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,311,046,793)	(687,232,877)	(623,813,916)	90.77
EKUITAS AKHIR	13,026,377,187	14,337,423,980	(1,311,046,793)	(9.14)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 21 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/02/26 1:38 PM

Tgl Cetak : 21/02/26 9:13 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	7,459,429	0	7,459,429	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	7,459,429	0	7,459,429	
ASET TETAP				
Tanah	10,878,192,000	10,878,192,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,571,603,825	3,024,466,325	547,137,500	18.09
Gedung dan Bangunan	7,042,794,000	7,042,794,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,432,742	9,432,742	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,378,809,850)	(6,616,145,884)	(762,663,966)	11.53
JUMLAH ASET TETAP	14,123,212,717	14,338,739,183	(215,526,466)	(1.50)
JUMLAH ASET	14,130,672,146	14,338,739,183	(208,067,037)	(1.45)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,103,244,959	1,315,203	1,101,929,756	83,784.01
Pendapatan Diterima Dimuka	1,050,000	0	1,050,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,104,294,959	1,315,203	1,102,979,756	83,863.84
JUMLAH KEWAJIBAN	1,104,294,959	1,315,203	1,102,979,756	83,863.84
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,026,377,187	14,337,423,980	(1,311,046,793)	(9.14)
JUMLAH EKUITAS	13,026,377,187	14,337,423,980	(1,311,046,793)	(9.14)
JUMLAH EKUITAS	13,026,377,187	14,337,423,980	(1,311,046,793)	(9.14)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,130,672,146	14,338,739,183	(208,067,037)	(1.45)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 21 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris


NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004 198610062009121004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:31 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	10,878,192,000	10,878,192,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,024,466,325	3,024,466,325	0	0.00
Gedung dan Bangunan	7,042,794,000	7,042,794,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,432,742	9,432,742	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,616,145,884)	(5,929,129,112)	(687,016,772)	11.59
JUMLAH ASET TETAP	14,338,739,183	15,025,755,955	(687,016,772)	(4.57)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	182,401,333	(182,401,333)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(182,401,333)	182,401,333	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	14,338,739,183	15,025,755,955	(687,016,772)	(4.57)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,315,203	166,098	1,149,105	691.82
Pendapatan Diterima Dimuka	0	933,000	(933,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,315,203	1,099,098	216,105	19.66
JUMLAH KEWAJIBAN	1,315,203	1,099,098	216,105	19.66
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)
JUMLAH EKUITAS	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)
JUMLAH EKUITAS	14,337,423,980	15,024,656,857	(687,232,877)	(4.57)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,338,739,183	15,025,755,955	(687,016,772)	(4.57)

Keterangan :

FINAL

Banyumas, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



NORMANDITO WIJAYA

198610062009121004 198610062009121004

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 3/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	18		Reklasifikasi Neraca
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penyusutan Aset	22		Uang Muka Belanja
7		Kas Di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
8		Kas di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
9		Persediaan	25		Hibah Langsung
1		Koreksi Antar Beban	26		
0					
1		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		
1					
1		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
2					
1		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29		Penyesuaian Neraca
3					
1		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30		Jurnal Koreksi
4					
1		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Umum
5					

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	Rp.148.590,-	
	K	212112	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		Rp. 148.590,-

Keterangan:

Beban Langganan Air bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.
Tanggal : 31-12-2025



Disetujui oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M
Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.
Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 1/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	18		Reklasifikasi Neraca
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penyusutan Aset	22		Uang Muka Belanja
7		Kas Di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
8		Kas di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
9		Persediaan	25		Hibah Langsung
1		Koreksi Antar Beban	26		
0					
1		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		
1					
1		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
2					
1		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29		Penyesuaian Neraca
3					
1		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30		Jurnal Koreksi
4					
1		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Umum
5					

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511129	Beban Uang Makan PNS	Rp. 1.369.000.00,-	
	K	212112	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		Rp. 1.369.000.00,-

Keterangan:
Uang makan bulan Desember 2025 yang dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.
Tanggal : 31-12-2025



Ditetapkan oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M
Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.
Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 2/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	16	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
2	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
3	<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	18	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
4	<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
5	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	20	<input type="checkbox"/>	Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	21	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di BLU
6	<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	22	<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
7	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	23	<input type="checkbox"/>	Perolehan Aset
8	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	24	<input type="checkbox"/>	Koreksi Piutang/utang
9	<input type="checkbox"/>	Persediaan	25	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung
1	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban	26	<input type="checkbox"/>	
0					
1	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29	<input type="checkbox"/>	Penyesuaian Neraca
3	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30	<input type="checkbox"/>	Jurnal Koreksi
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	<input type="checkbox"/>	Jurnal Umum
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp. 1.000.000.00,-	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		Rp. 1.000.000.00,-

Keterangan:

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.

Tanggal : 31-12-2025



Disetujui oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M

Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.

Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 5/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	18		Reklasifikasi Neraca
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penyusutan Aset	22		Uang Muka Belanja
7		Kas Di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
8		Kas di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
9		Persediaan	25		Hibah Langsung
1		Koreksi Antar Beban	26		
0					
1		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		
1					
1		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
2					
1		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29		Penyesuaian Neraca
3					
1		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30		Jurnal Koreksi
4					
1		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Umum
5					

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja LanggananTelepon	Rp. 95.121,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 95.121,-

Keterangan:
 Belanja LanggananTelepon bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
 Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.
 Tanggal : 31-12-2025



Ditetujui oleh :
 Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M
 Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
 Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.
 Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 4/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	18		Reklasifikasi Neraca
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penyusutan Aset	22		Uang Muka Belanja
7		Kas Di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
8		Kas di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
9		Persediaan	25		Hibah Langsung
1		Koreksi Antar Beban	26		
0					
1		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		
1					
1		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
2					
1		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29		Penyesuaian Neraca
3					
1		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30		Jurnal Koreksi
4					
1		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Umum
5					

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp. 19.361.528,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 19.361.528,-

Keterangan:
Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.
Tanggal : 31-12-2025



Disetujui oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M
Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.
Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 7/JPK/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	16		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	18		Reklasifikasi Neraca
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19		Koreksi Beban Aset
5		Penyisihan Piutang	20		Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penghapusan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penyusutan Aset	22		Uang Muka Belanja
7		Kas Di Bendahara Penerimaan	23		Perolehan Aset
8		Kas di Bendahara Pengeluaran	24		Koreksi Piutang/utang
9		Persediaan	25		Hibah Langsung
1		Koreksi Antar Beban	26		
0					
1		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27		
1					
1		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
2					
1		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29		Penyesuaian Neraca
3					
1		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30		Jurnal Koreksi
4					
1		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Umum
5					

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511324	Belanja Langganan Listrik	Rp. 837.000.000,-	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp. 837.000.000,-

Keterangan:

Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.
Tanggal : 31-12-2025



Ditetujui oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M
Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.
Tanggal : 31-12-2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : (0300) JAWA TENGAH
 Satuan Kerja : (098022) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
 No. Dokumen : 008/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	16	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
2	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	17	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
3	<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	18	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
4	<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	19	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
5	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	20	<input type="checkbox"/>	Penapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	21	<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di BLU
6	<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	22	<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
7	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	23	<input type="checkbox"/>	Perolehan Aset
8	<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	24	<input type="checkbox"/>	Koreksi Piutang/utang
9	<input type="checkbox"/>	Persediaan	25	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung
1	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban	26	<input type="checkbox"/>	
0					
1	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	27	<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	29	<input type="checkbox"/>	Penyesuaian Neraca
3	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	30	<input type="checkbox"/>	Jurnal Koreksi
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
1	<input type="checkbox"/>	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	<input type="checkbox"/>	Jurnal Umum
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp. 50.000.00,-	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		Rp. 50.000.00,-

Keterangan:

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bulan Desember 2025 yang ditagihkan/dibayar Januari 2026

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum dan Keuangan

ARIESTI SUMARTINA, S.H.

Tanggal : 31-12-2025



Disetujui oleh :
Sekretaris

NORMANDITO WIJAYA, S.KOM., M.M

Tanggal : 31-12-2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP

LULI NUR IRMALASARI, S.T.

Tanggal : 31-12-2025